

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam ranah perpolitikan di Indonesia masih tergolong rendah, hal tersebut terbukti dengan persentasi perempuan yang mencalonkan menjadi Gubernur, Walikota, dan Bupati pada Pilkada serentak tahun 2024 hanya mencapai 9,44% (Yuniarto, 2024).

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dikutip oleh Kompaspedia, disebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Pilkada Serentak 2015, dari 1.646 kandidat kepala daerah, hanya 124 perempuan yang mencalonkan diri, dan jumlah ini menurun pada Pilkada 2017 menjadi 44 perempuan dari 614 kandidat. Namun, pada Pilkada 2024 menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan, dengan 18 kandidat untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, 210 di tingkat Bupati dan Wakil Bupati, serta 81 untuk Walikota dan Wakil Walikota. Meskipun ada peningkatan, tetapi jumlah ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan partisipasi kandidat laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik, khususnya dalam kepemimpinan daerah masih rendah.

Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan oleh kendala kultural, struktural dan anggapan-anggapan bias gender yang terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu

sendiri (Fauziah et al., 2023). Keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan hal yang penting, dimana dengan teribatnya perempuan dalam politik bisa menciptakan masyarakat yang setara salahsatunya dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan gender.

Budaya patriarki merupakan salah satu kendala kultural yang menjadi salah satu hambatan perempuan untuk menjadi pemimpin dan keikutsertaannya dalam kontestasi politik. Budaya patriarki ini merupakan sistem sosial yang didasarkan pada hubungan hirarki pada jenis kelamin. Dimana, laki-laki ditempatkan sebagai kategori sosial yang mendominasi, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai kategori sosial lainnya atau seakan sebagai pendukung, sehingga adanya subordinasi perempuan tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari penindasan (Ii & Patriarkhi, 2013). Sehingga budaya patriarki menghasilkan anggapan bahwa perempuan yang menjadi pemimpin ataupun terjun dalam politik merupakan suatu hal yang tidak wajar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (Tondang et al., 2023). Meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan, tetapi ditingkat lokal seperti di Tasikmalaya masih belum efektif. Rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya terlihat di posisi kepala daerah, tetapi juga di lembaga legislatif. Menurut Masitoh, Dalam lembaga legislatif secara kuantitas perempuan masih sangat terbatas, begitupun dengan posisinya yang kerap dijadikan sebagai penghias (Masitoh, 2017). Hal ini Terbukti dari partisipasi anggota DPRD perempuan di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2019-2023 hanya

berjumlah 3 orang dari total 45 anggota DPRD (Badan Pusat Statistika Kota Tasikmalaya, 2024). Begitu pula dengan posisi kepala daerah, hanya satu perempuan sepanjang sejarah Pilkada langsung di Kota Tasikmalaya yang mencalonkan diri yaitu Nurhayati.

Kultur sosial masyarakat Kota Tasikmalaya secara historis mencerminkan dominasi budaya patriarki. Hal ini semakin diperkuat oleh pengaruh kultur pesantren yang kuat di wilayah tersebut (Agung & Yuliwati, 2014). Pesantren, sebagai salah satu institusi pendidikan berbasis agama yang berperan besar dalam kehidupan sosial masyarakat Tasikmalaya, sering kali lebih menonjolkan peran laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Hal tersebut bukan tidak berdasar, dalam Al-qur'an terdapat ayat "*ar-rijalu qoawamuna'ala an-nisa'*" yang artinya "*lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita*", dengan adanya ayat ini menjadi landasan pemberar pemimpin itu harus laki-laki (satriawan, 2019).

Selain itu adanya dominasi laki-laki dalam politik di Tasikmalaya juga tercermin dalam birokrasi pemerintahan. Hingga saat ini, tidak ada kepala dinas perempuan di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya, bahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan justru dipimpin oleh seorang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan masih sangat terbatas, baik dalam ranah politik maupun administrasi pemerintahan.

Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, Nurhayati mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai Walikota Tasikmalaya. Keputusan Nurhayati untuk maju sebagai calon Wali Kota di tengah

dominasi kandidat laki-laki dan kultur sosial masyarakat Kota Tasikmalaya yang cenderung patriarki, merupakan bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki yang menempatkan perempuan di luar ranah politik. Meskipun pada akhirnya mengalami kekalahan, keberanian Nurhayati untuk bersaing di arena politik lokal menunjukkan adanya resistensi terhadap struktur yang membatasi partisipasi perempuan.

Sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurhayati memiliki rekam jejak yang mengesankan, termasuk dua kali terpilih sebagai anggota DPR-RI. Namun, meskipun memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam dunia politik, tetapi Nurhayati tidak berhasil memenangkan Pilkada. Nurhayati hanya memperoleh 19,8% suara, jauh di bawah pasangan Viman Alfarizi-Dicky Candra yang meraih 59,8% suara (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Kekalahan Nurhayati ini cukup menarik untuk diteliti jika melihat rekam jejak Nurhayati yang sangat baik di dunia politik. Nurhayati merupakan seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lahir di Tasikmalaya pada 20 November 1969. Ia dikenal sebagai tokoh perempuan yang memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam dunia perpolitikan. Sebagai kader PPP sejak 2009, Nurhayati telah dua kali terpilih menjadi anggota DPR-RI, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat.

Pada periode kedua masa jabatannya di Komisi IX, Nurhayati fokus dalam isu kesehatan dan ketenagakerjaan, seperti pencegahan stunting dan sosialisasi BPJS Kesehatan. Ia aktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, bahkan blusukan ke daerah-daerah terpencil. Di sektor ketenagakerjaan, ia

memperjuangkan hak-hak pekerja dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Nurhayati juga aktif dalam isu sosial. Pada tahun 2023, ia mendirikan LBH SEHATI, sebuah lembaga bantuan hukum untuk korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, ia aktif mendukung pelaku UMKM dan memberikan pelatihan keterampilan bagi generasi muda di daerahnya.

Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, Nurhayati maju sebagai calon kepala daerah, dengan komitmennya untuk membawa perubahan di Kota Tasikmalaya, melalui visi "Tasik Beres" Berdaya Saing, Religius, dan Sejahtera, pasangan Nurhayati-Muslim ini berupaya menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat Kota Tasikmalaya (Nugraha, 2024). Dengan visi yang diusung Nurhayati ini menyiratkan agenda inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender. Ia juga aktif menggunakan pendekatan berbasis komunitas, seperti blusukan ke masyarakat dan mendorong program-program sosial berbasis keluarga dan perempuan, hal tersebut menjadi bentuk nyata dari strategi resistensi terhadap struktur politik yang bias gender.

Salah satu tantangan yang dihadapi Nurhayati dalam pilkada 2024 ini adalah dominasi kandidat laki-laki, dimana pasangan Viman-Dicky, Ivan-Dede, Yusuf-Hendro, dan Yanto-Amin merupakan pesaing Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Namun, keterlibatan aktif Nurhayati dalam mendobrak narasi dominan bahwa politik adalah wilayah laki-laki, serta usahanya untuk membangun basis dukungan dari komunitas perempuan dan masyarakat, menunjukkan bahwa

Nurhayati mencoba melakukan resistensi terhadap struktur patriarki yang sistemik dalam politik lokal.

Kekalahan Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya ini menarik untuk diteliti. Salah satunya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk terpilih menjadi pemimpin serta bagaimana Nurhayati sebagai calon Wali Kota perempuan untuk melawan hambatan yang ada. Dikarenakan kekalahan Nurhayati ini mencerminkan tantangan yang lebih besar yang sering dihadapi oleh perempuan dalam politik. Dimana timbulnya kondisi ini berangkat dari budaya yang menempatkan peran perempuan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ranah domestik. Di sisi lain, politik sering kali diasosiasikan dengan kekuasaan, yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah dominasi laki-laki (Labolo et al., 2019).

Tradisi pembagian kerja gender yang telah lama berlaku memposisikan perempuan untuk bekerja di sektor domestik, sementara laki-laki bekerja di sektor publik (Politik & Kusmayadi, 2014). Meskipun gerakan feminis dan aktivis perempuan berjuang untuk mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan, praktik budaya patriarki masih tetap ada di berbagai aspek kehidupan, seperti dalam aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa patriarki masih eksis dan berperan dalam mempengaruhi struktur sosial yang ada saat ini (Agung & Yuliwati, 2014).

Keterlibatan perempuan dalam ranah politik, seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan Nurhayati dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah, masih menghadapi hambatan yang kompleks. Kekalahan Nurhayati dalam Pilkada Kota

Tasikmalaya 2024 bisa menjadi gambaran mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik. Kendala struktural, kultural, dan bias gender yang kuat bisa menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan tempat dalam kepemimpinan politik. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori struktur patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby. Dimana Walby menjelaskan bahwa patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan superior, sedangkan perempuan dijadikan subordinasi atau pihak kedua, menurut Walby terdapat enam struktur utama patriarki yang membatasi perempuan, yaitu produksi domestik, pekerjaan, kekerasan, hubungan budaya, relasi negara, dan seksualitas (Walby, 1989).

Teori Sylvia Walby mengenai enam kerangka struktur patriarki yang terdiri dari produksi domestik, pekerjaan, kekerasan, hubungan budaya, relasi negara, dan seksualitas, memberikan konsep pemikiran untuk menganalisis kekalahan Nurhayati melalui pemahaman bagaimana hambatan struktural, kultural, dan politik saling berkaitan dalam membatasi perempuan. Sehingga fenomena ini dapat dikaitkan dengan relasi negara yang belum mampu mengatasi kendala struktural seperti minimnya dukungan institusi politik terhadap keterlibatan perempuan. Hubungan budaya di Kota Tasikmalaya, yang masih dipengaruhi oleh norma patriarki dan tradisi pesantren, memperkuat stereotipe gender yang memandang perempuan kurang layak memimpin.

Selain itu terkait akses modal yang dimiliki, dimana menurut laporan dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU, dana kampanye yang dimiliki pasangan Nurhayati-Muslim ini sebesar Rp 528.000.000, tergolong kecil jika dibandingkan

pasangan Viman-Diky dengan nominal mencapai Rp 2.015.042.028 (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Hal tersebut menjadi selaras dengan dukungan finansial dan logistik untuk kampanye, bisa lebih mudah diberikan kepada kandidat laki-laki, karena persepsi bahwa mereka lebih memiliki peluang untuk menang dibandingkan dengan kandidat perempuan. Dengan demikian, teori Walby memberikan kerangka untuk memahami hambatan sistemik yang dihadapi perempuan seperti Nurhayati dalam mencapai posisi kepemimpinan di ranah politik.

Hambatan struktural terhadap perempuan dalam politik tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Kasus kekalahan kandidat perempuan dalam Pilkada telah banyak terjadi, yang menunjukkan bahwa struktur patriarki masih melakukan resistensi terhadap keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik di tingkat daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa patriarki menjadi salah satu hambatan bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan dalam kontestasi politik. Seperti dalam penelitian Ariq Abrar Assidqi (2018) di Pangkalpinang, menemukan bahwa terdapat banyak masyarakat Pangkalpinang yang memandang perempuan sebagai sosok yang berada di posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki, kemudian sifat feminin dan kecenderungan emosional yang selalu diidentikan dengan perempuan dianggap kurang sesuai dengan citra ideal seorang pemimpin yang kuat dan tegas. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kekalahan Endang Kusmayaty dalam Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2018.

Penelitian oleh Cut Septya Mauliza dan Faradilla Fadlia (2018) di Banda Aceh juga menunjukkan kekalahan perempuan dalam Pilkada disebabkan masih terdapat budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat dan negative campaign selama masa kampanye Illiza Sa'aduddin Djamal.

Penelitian lain oleh Tevana Sari Dewi (2021) di Kudus, menyoroti bagaimana stigma masyarakat yang sering merendahkan perempuan dalam kepemimpinan, di mana perempuan masih dianggap lemah, kurang tegas, sulit dipercaya, dan tidak mampu menjalankan tugas secara optimal di ranah publik. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perempuan menjadi salah satu faktor kegagalan Hj. Sri Hartini, S.T dalam Pilkada Kudus.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa patriarki merupakan hambatan signifikan bagi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan, terutama dalam kontestasi politik. Budaya patriarki yang mengakar di masyarakat, seperti yang ditemukan di Pangkalpinang, Banda Aceh, dan Kudus, menjadi contoh bagaimana struktur patriarki mempengaruhi kekalahan perempuan dalam Pilkada. Adanya anggapan di mana perempuan dianggap inferior, kurang tegas, terlalu emosional, dan tidak sesuai dengan citra pemimpin yang ideal. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan juga dipengaruhi oleh stigma gender, kampanye negatif, serta persepsi bahwa sifat feminin tidak mendukung kepemimpinan yang ideal.

Selain itu, kendala struktural seperti lemahnya rekrutmen partai, minimnya basis sosial, serta kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender semakin memperburuk peluang perempuan untuk terpilih. Praktik politik pragmatis seperti

politik uang, keterlambatan pencalonan, dan minimnya sosialisasi visi-misi kandidat perempuan juga ditemukan menjadi hambatan perempuan dalam penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut lebih banyak membahas faktor eksternal, seperti budaya patriarki dan kendala praktis, misalnya kurangnya dukungan masyarakat atau politik uang. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menggali lebih dalam tentang bagaimana dominasi patriarki bekerja secara sistematis dan simbolis dalam menghambat perempuan di politik. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggunakan teori struktur patriarki oleh Sylvia Walby. Pendekatan ini akan menganalisis hambatan sistemik, seperti pola diskriminasi yang tertanam dalam budaya, institusi politik, dan kebijakan, yang membuat perempuan sulit bersaing secara setara di ranah politik.

Studi kasus kekalahan Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 mencerminkan bagaimana hambatan struktural masih membatasi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Struktur patriarki di Kota Tasikmalaya tetap bertahan dalam berbagai bentuk, mulai dari norma budaya yang lebih mendukung kepemimpinan laki-laki, hingga sistem politik yang kurang memberikan akses setara bagi kandidat perempuan. Bahkan dengan adanya kebijakan afirmasi gender, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hambatan sistemik masih kuat dalam mempertahankan dominasi laki-laki dalam politik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur patriarki di Kota Tasikmalaya secara masif menghambat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kekalahan Nurhayati dalam

Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, serta bagaimana resistensi terhadap struktur patriarki yang dilakukan Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024.

Dengan menggunakan teori struktur patriarki Sylvia Walby untuk mengidentifikasi bagaimana hambatan struktur patriarki yang berasal dari produksi domestik, pekerjaan berbayar, kekerasan, hubungan budaya, relasi negara, dan seksualitas berkontribusi dalam menghambat keterlibatan perempuan dalam pencalonan kepala daerah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik masih mempertahankan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan. Meskipun kebijakan afirmasi gender telah diterapkan, hambatan sistemik masih membuat perempuan sulit untuk mencapai posisi kepemimpinan.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik lokal serta perspektif baru mengenai bagaimana resistensi patriarki memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik lokal, sekaligus memperluas analisis dibandingkan penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Kekalahan Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik lokal, terutama di wilayah yang masih kental dengan budaya patriarki. Meski memiliki rekam jejak politik yang baik dan visi yang jelas, dominasi struktur patriarki tampak menjadi salah satu faktor yang menghambat terpilihnya perempuan sebagai pemimpin. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merusmuskan permasalahan menjadi

pertanyaan dalam penelitian ini mengenai: “Bagaimana Resistensi Struktur Patriarki atas Kekalahan Nurhayati pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana resistensi struktur patriarki atas kekalahan Nurhayati dalam PILKADA Kota Tasikmalaya 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur akademik mengenai pengaruh budaya patriarki terhadap kekalahan kandidat perempuan dalam pemilihan kepala daerah, khususnya dalam konteks politik lokal. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik, khususnya terkait gender dan politik, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang ingin mendalami isu gender dalam politik, terutama tantangan dan hambatan perempuan dalam proses pemilihan umum.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya representasi perempuan dalam politik.

c.